



# DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg>

## PENGEMBANGAN DESA WISATA HERITAGE KAYUTANGAN KOTA MALANG BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE

**Hendra Wijayanto**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

[hendra.wijayanto.fisip@upnjatim.ac.id](mailto:hendra.wijayanto.fisip@upnjatim.ac.id)

### ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

*Article history:*

Received date: 25 September 2024

Revised date: 14 November 2024

Accepted date: 30 November 2024

*Development of Kayutangan Malang Heritage Tourism Village based on cooperative governance. Malang City Government continues to strive to strengthen the tourism sector and strengthen collaboration with local communities and stakeholders. The form of cooperation between the Malang City Government, Pokdarwis and the community involved in the implementation of the development of Kayutangan Tourism Village. In local government as one of the work programs to develop the tourism sector in thematic villages, collaborating with the community through the role and function of the Ministry of Youth, Sports, and Tourism to strengthen and increase regional income through the tourism sector that carries out regional promotion. Activities for local and foreign tourists under the auspices of the Malang City Government, Pokdarwis City Tourism Development Program.*

**Keywords:** *Tourism, Collaborative Governance, Community, Local*

### ABSTRAKSI

Pengembangan Desa Wisata Heritage Kayutangan Malang berbasis tata kelola koperasi. Pemerintah Kota Malang terus berupaya memperkuat sektor pariwisata dan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan. Bentuk kerjasama antara Pemerintah Kota Malang, Pokdarwis dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Wisata Kayutangan. Dalam pemerintahan daerah sebagai salah satu program kerja untuk mengembangkan sektor pariwisata di desa tematik, melakukan kerjasama dengan masyarakat melalui peran dan fungsi Kementerian Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata untuk memperkuat dan meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata yang melaksanakan promosi daerah. Kegiatan bagi wisatawan lokal dan mancanegara dibawah naungan Pemerintah Kota Malang, Program Pengembangan Pariwisata Kota Pokdarwis.

**Kata Kunci:** *Wisata, Collaborative Governance, Masyarakat, Lokal*

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah dikatakan optimal apabila pemerintah mampu mengelola potensi daerahnya dengan baik dengan mengintegrasikan peran dan fungsi pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya alam atau potensi sumber daya pariwisata. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, seperti modal pembangunan dan sarana seperti teknologi informasi, yang ditujukan untuk memungkinkan pengembangan dan penyelarasan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah sebagai wujud pembangunan nasional bertujuan untuk mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan daerah yang satu dengan daerah yang lain. Pariwisata merupakan bagian dari wilayah tersebut dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangannya. Nasrul (2010) Pariwisata merupakan suatu kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar dan dapat mendatangkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam arti pembangunan untuk memacu sektor pariwisata dalam negeri, sehingga dapat menunjang jasa dalam negeri.

Pemerintah adalah actor yang memainkan peran sebagai pemangku kepentingan utama dalam mempromosikan pengembangan pariwisata bekerja sama dengan sektor swasta, masyarakat (termasuk pemimpin masyarakat, pemimpin agama, media, LSM, dan akademisi). Dalam hal ini, pemerintah akan menjadi aktor pelaksana tata kelola kolaboratif untuk melaksanakan program pengembangan sektor pariwisata yang memenuhi kebutuhan publik melalui perumusan berbagai kebijakan dan regulasi.

Ansell & Gash (2020) Dalam hal ini, collaborative governance merupakan proses mendukung pemerintah sebagai aktor utama

dalam pendalaman pengembangan pariwisata, melibatkan pemangku kepentingan potensial, serta membuat regulasi, pedoman, dan peraturan. Hal ini merupakan bentuk proses kolaboratif antar pemangku kepentingan. pemangku kepentingan untuk mencapai Pengembangan kepariwisataan lebih lanjut diharapkan dapat dirumuskan melalui Petunjuk Teknis Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Sumber Daya Takbenda dalam Pengembangan Kepariwisata. Pasal 10: Pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan daerah, yang merupakan daerah otonom kewenangannya.

Pemerintah Kota Malang mempunyai otonomi berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan memerlukan dukungan optimal dari seluruh unsur kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Keyutang yang membina pelaksanaan pembangunan desa. Prinsip-prinsip utama pengembangan pariwisata bagi pemerintah kota mengenai permodalan, aksesibilitas, fasilitas, prasarana umum dan fasilitas umum sebagai perwujudan peran dan fungsi dalam program pengembangan pariwisata Davis dan White (2012) Masyarakat Kayutangan berperan serta dalam pengembangan desa wisata Kayutangan Dengan mendorong mereka untuk dihargai dan dilihat seperti itu.

Pembangunan Desa Wisata Kayutangan Heritage di Kota Malang yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur merupakan inisiatif otonom daerah untuk mengoptimalkan potensi wisata melalui pelibatan masyarakat melalui penguatan masyarakat Desa Wisata

Kayutangan untuk menggali pariwisata akan sangat berkontribusi terhadap kemajuan. Dalam rangka mengembangkan dan mengembangkan Kota Malang, maka pemerintah kota Malang akan memanfaatkan potensi daerah secara maksimal.

Peran masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dengan berpartisipasi aktif dalam mengungkapkan keinginan dan kebutuhannya. Hal ini dapat dicapai melalui penciptaan komunitas dimana program komunitas dapat dipadukan dengan program pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan kelompok masyarakat merupakan bentuk pemutakhiran program pemerintah.

Merupakan metode penelitian yang tepat dan tepat untuk menganalisis tata kelola kooperatif yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Malang dalam pembangunan Desa Wisata Cagar Budaya Kayutangan di Kota Malang serta untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan keberhasilan yang maksimal dalam penyelesaian dan realisasinya hal tersebut dijelaskan di atas. Hal ini merupakan hasil kolaborasi dengan Pemerintah Kota Malang. Pengembangan pariwisata adalah Yoeti, Oku (1999), dan pengembangan pariwisata sebagai objek wisata harus mampu menciptakan gaya produk dari segi daya tarik wisata dan perbedaan dengan daya tarik wisata lainnya mungkin. Selanjutnya berupa sarana atraksi wisata, sarana transportasi dan akomodasi, sarana komunikasi, dan sarana penunjang lainnya. Agar pembangunan pariwisata dapat berjalan secara seimbang, maka diperlukan fokus tidak hanya pada sasaran tertentu saja tetapi juga pada infrastruktur lain yang mendukung pembangunan pariwisata, seperti transportasi, komunikasi, akomodasi, dan fasilitas berskala kecil lainnya (Bambang Sunaryo (2013).

Konsep pembangunan yang mempunyai tujuan yang sama meliputi aspek daya tarik, kenyamanan, aksesibilitas, pelayanan penunjang, dan kelembagaan. Daya tarik dapat disebut sebagai daya tarik utama yang merupakan unsur penting pembangunan suatu daerah yang dapat menjadi sasaran pembangunan, dan sebagai wujud pembangunan berkembang menjadi daya tarik yang mencakup seluruh unsur sesuatu berupa potensi sumber daya yang dimilikinya syarat untuk dan memanfaatkan sumber daya alam sebaik-baiknya. Dalam hal ini yang menjadi pertumbuhan daerah adalah sektor pariwisata.

Berdasarkan Undang-Undang Pembangunan Kepariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, daerah tujuan wisata adalah suatu daerah tujuan wisata yang mempunyai keunikan, keindahan, nilai, keanekaragaman budaya, kekayaan alam, dan benda buatan yang menjadi tujuan pokok pariwisata. mengacu pada Dalam pengembangan pariwisata, pembangunan, prasarana dan sarana sangatlah penting agar pengembangan pariwisata dapat berkembang dan tumbuh serta memnuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam konteks pengembangan pariwisata yang berhubungan dengan pemerintah, Nasikun (1993:26-36) memaparkan salah satu strategi pemerintah dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang mempunyai ciri khas dan beberapa ciri sebagai berikut. Kebutuhan masyarakat terhadap pengembangan sasaran pariwisata.

Administrasi publik merupakan suatu perspektif pemerintahan antara teori dan praktik, dengan tujuan untuk memahami peran dan fungsi pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diaturnya, serta mendorong kebijakan dan peraturan yang lebih

responsif terhadap kebutuhan dimensi sosial kombinasi kompleks dari masyarakat. Administrasi publik dalam pembangunan bertujuan untuk mengembangkan praktik pengelolaan publik agar lebih mencerminkan nilai efektivitas, efisiensi, dan kebutuhan masyarakat. Nicholas Henry Alam Luciana D., Ronto (1988). Administrasi publik merupakan suatu usaha kolaboratif yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terdiri dari penyelenggara dengan organisasi dan sarana untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian dapat diuraikan bahwa Ilmu Administrasi Publik dalam ruang lingkup pembangunan pariwisata sebagai berikut: Dalam bidang hubungan peristiwa dan gejala pemerintahan meliputi

- a. Administrasi Pemerintah Pusat
- b. Administrasi Pemerintah Daerah
- c. Administrasi Pemerintah Kecamatan
- d. Administrasi Pemerintah Kelurahan
- e. Administrasi Pemerintahan Desa
- f. Administrasi Pemerintahan Kotamadya
- g. Administrasi Pemerintahan Kota Administratif
- h. Administrasi Departemen
- i. Administrasi non Departemen.

Ansel dan Gash (2008) mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai struktur yang terdiri dari keterlibatan pemerintah dan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan formal, dan desentralisasi peran dalam implementasi kebijakan publik dan pengelolaan program dan aset publik pemerintahan. Lebih lanjut, “collaborative governance” dapat dipahami sebagai kegiatan kerja sama antara pemerintah dan seluruh komponen sosial ekonomi yang terlibat dalam memenuhi kebutuhan penduduk. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peran dan fungsi sebagai subjek dalam proses pelaksanaan kerjasama.

Selain dari pengertian Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansel & Gaash (2008), dapat dirumuskan menjadi enam ciri menurut mereka yang berpendapat bahwa kolaborasi merupakan suatu kegiatan tata kelola nasional atau serangkaian kegiatan dalam pelaksanaannya. Diprakarsai atau dilaksanakan oleh otoritas publik. Forum ini juga mencakup pihak swasta, forum yang diselenggarakan secara formal, dan pertemuan yang diadakan bersama.

Emerson, Nabatchi & Bologh (2011), mereka mendefinisikan kolaborasi sebagai motivasi bersama. dan pertunangan.” Atau bagikan motif. Hal ini mencerminkan intensifikasi siklus model kerjasama. Model kolaborasi terdiri dari elemen kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen bersama, yang merupakan beberapa elemen kunci untuk mengintegrasikan organisasi sebagai proses kolaboratif. Menetapkan prinsip-prinsip umum melalui proses dialog bersama antara seluruh peserta atau pemangku kepentingan.

Kerja sama sebagai wujud proses interaksi yang berkesinambungan antara pemerintah dan aktor dalam proses pelaksanaan kerjasama, melibatkan beberapa unsur pemerintah dan non-pemerintah, baik lembaga masyarakat, individu maupun pemangku kepentingan, melibatkan partisipasi seluruh elemen. Hal ini secara langsung melestarikan hasil dan manfaat dari proses kolaboratif Dwiyanto Agus (2015).

Lebih lanjut Emerson dan Nabatchi (2011) mencatat bahwa hasil dari proses kerjasama dapat berubah dalam bentuk perubahan kualitatif dan kuantitatif pada aspek fisik dan non fisik seperti lingkungan, sosial, ekonomi, politik, dll. Kegiatan kerjasama yang dikaitkan dengan kondisi sosial sosial, ekonomi dan lingkungan atau aspek legitimasi politik

masyarakat terhadap pemerintah urut mempengaruhi hasil dan kegiatan kerjasama yang dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Dengan penelitian ini peneliti bertujuan untuk melakukan analisis terkait ko-manajemen pengembangan desa wisata Kayutangan berbasis partisipasi masyarakat Kayutangan Kota Malang. Menurut Moleong, J. Lexy (2014), fokus penelitian pada dasarnya adalah pada pertanyaan-pertanyaan pokok yang timbul dari pengalaman peneliti atau pengalaman yang diperoleh melalui keilmuan dan literatur lainnya.

Selain itu, tempat penelitian merupakan tempat peneliti memperoleh informasi mengenai data yang dibutuhkannya (Suwarna Al Muchtar, 2015). Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Lokasi survei adalah Dinas Promosi Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Pokdarwis, Desa Wisata Heritage Kayutangan, Kota Malang, Kelurahan Kauman, dan ITN Malang.

Selain fokus dan lokasi penelitian, sumber data utama akan dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Ini adalah hasil upaya kolaboratif dalam melihat, mendengarkan, dan mengajukan pertanyaan (Lofland dan Lofland dalam Moleong 2014). Melalui pengambilan sampel yang ditargetkan. Pengambilan sampel secara sengaja merupakan suatu teknik untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan luas dan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai subjek penelitian.

Selanjutnya peneliti memperoleh sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi narasumber yang dilakukan peneliti.

Di sisi lain, data sekunder diperoleh dari bahan tertulis seperti buku, rencana, jurnal dan makalah akademis. Selanjutnya dilakukan analisis data. Ini melibatkan empat rangkaian tugas: pengumpulan data, pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau tinjauan.

## **PEMBAHASAN**

Jika berbicara mengenai pengembangan pariwisata daerah, maka kapasitas pengelolaan daerah pemerintah daerah menjadi hal yang penting. Berkaitan dengan konsep perencanaan pembangunan yang dikemukakan dalam buku Teori Perencanaan (Faludi, 1973), pembangunan tidak dapat berhasil tanpa adanya perencanaan yang matang. Oleh karena itu, rencana yang dilaksanakan oleh perencana profesional selama proses mempengaruhi hasil pembangunan. Dalam mendorong pembangunan daerah, peran dan fungsi Pemerintah Kota Malang terbatas dari segi sumber daya, sehingga Pemerintah Kota Malang tidak dapat menanganinya sendirian. Hal ini dikenal dengan konsep pembangunan berbasis masyarakat. Tata kelola kolaboratif.

Seperti Ansel dan Gash (2008) Ansel dan Gash (2008) Tata kelola kolaboratif didefinisikan sebagai tata kelola yang terstruktur melalui keterlibatan pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan formal, dengan tujuan desentralisasi peran. Implementasi langkah-langkah pembangunan. Mereka dapat membuat kebijakan dan mengelola program dan aset publik. Lebih lanjut, adanya inisiatif perencanaan dan kebijakan berkaitan erat dengan menjaga dan meningkatkan kualitas ruang dan kawasan, serta komitmen moral terhadap keadilan sosial yang muncul dari pengalaman hidup sehari-hari dalam konteks sosial. Budaya yang beragam menghargai lingkungan dan cara hidup lokal.

Pariwisata dianggap sebagai sektor pendukung dan terpenting selain industri minyak dan gas dan diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap:

1. Sumber devisa negara
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara/daerah
3. Memperkuat perekonomian daerah
4. Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha
5. Peningkatan pemasaran produk dalam negeri
6. Peningkatan kesejahteraan
7. Terpeliharanya karakter bangsa
8. Terpeliharanya fungsi dan mutu lingkungan hidup.

Mengetahui hasil temuan peneliti tentang pengembangan Desa Wisata Pusaka Kayutagan berbasis Collaborative Governance di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang bekerja sama dengan Pokdalwis untuk meningkatkan peran serta masyarakat melalui penguatan desa wisata pusaka. Karena Malang merupakan kota yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata.

Desa warisan secara umum didefinisikan sebagai konsep yang mencakup kegiatan sosial atau budaya yang dikombinasikan dengan aspek kegiatan wisata. Menilik warisan dari aspek kontennya, lebih ditekankan pada upaya menghadirkan sejarah dan suasana peninggalan Belanda lama sebagai daya tarik utama wisata, tanpa mengabaikan kenyamanan. Pengertian tersebut mengacu pada ciri-ciri kegiatan rekreasi sosial yang ada di masyarakat, memadukan unsur pendidikan dan pengetahuan sosial ekonomi tentang sejarah Kota Kayutangammaran dalam kemasan paket wisata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Daja Pariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Malang, diperoleh informasi bahwa Pemerintah Kota Malang

menargetkan Pokdarwis sebagai mitra dalam operasional Desa Wisata Pusaka Kayutangan. Pengembangan Desa Wisata Heritage Kayutangan. Selain itu, Pokdarwis merupakan badan koordinator masyarakat dalam pengelolaan pengembangan Kampung Cagar Budaya Kayutangan di Kota Malang.

Sebagai wujud nyata Pemerintah Kota Malang dalam pengembangan Desa Wisata Heritage Kayutangan merupakan upaya bersama menyatukan seluruh sektor yang terlibat dalam pembangunan seperti Pokdarwis dan masyarakat untuk mengatur dan mengatur segala hal bersama dalam pelaksanaannya. Menyelenggarakan Program Pengembangan Desa Wisata Cagar Budaya Kayutangan untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien dalam pengembangan wisata cagar budaya Kota Malang.

Pembahasan temuan penelitian di atas berfokus pada model tata kelola kolaboratif dalam pembangunan pariwisata, yang meliputi:

1. Komitmen prinsip
2. Motivasi bersama
3. Tindakan kolektif Kemampuan untuk
4. Berkolaborasi dalam hasil

Malang, Pokdarwis Pengembangan pariwisata melalui pemerintahan bersama antara pemerintah kota dan pemerintah kota Ilmuwan serta wisatawan mencapai hasil pembangunan. Proses ini bertujuan untuk memastikan tata kelola pembangunan dalam Perjanjian Kerja Program Pembangunan Desa Wisata Kayutangan Heritage telah sesuai dengan rencana program dalam Peraturan Desa Wisata Kayutangan Heritage dalam Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017. Rencana Pemerintah Pembangunan Kawasan Strategis Kota Malang Tahun 2018 didasarkan pada Prosedur Pelaksanaan (SOP) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemuda, Olahraga, dan

Pariwisata, dan merupakan unsur utama yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan Wisata Warisan Kayutangan. Desa. Kota Malang bertanggung jawab.

Pemerintah Kota Malang kemudian membentuk kotamadya di bawah koordinasi Pokdarwis, kampung bersejarah Kayutangan, Kota Malang. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, desa wisata pusaka Kayutangan dapat muncul dan memberikan manfaat bagi pengembangan desa wisata pusaka yang diakui oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Salah satunya adalah meningkatkan pendapatan mandiri daerah (PAD) melalui pembangunan Desa Wisata Heritage Kota Malang.

## KESIMPULAN

Pendekatan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan pariwisata yang dilakukan Pemerintah Kota Malang dalam pembangunan Desa Wisata Kayutangan Heritage ini sejalan dengan kerja sama yang dilakukan Pemda Kota Malang dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Pokdarwis, komunitas, dan ilmuwan dapat dilihat pada pola komunikasi. , seluruh aktor yang berkontribusi secara intensif akan didukung oleh Kota Malang.

Model konsep Collaborative Governance yang digunakan Pemerintah Kota Malang telah berhasil membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kota Malang, khususnya masyarakat Desa Cagar Budaya dan Wisata Kayutangan. Keuntungan pengembangan desa wisata bersejarah berdasarkan konsep Collaborative Governance adalah pendapatan masyarakat meningkat karena adanya hasil usaha seperti gerai makanan dan minuman serta pusat oleh-oleh di kawasan wisata. Selain itu, kegiatan kemasyarakatan dapat didukung oleh modal dari DPRD Kota Malang, dan dana

kegiatan kemasyarakatan juga dikembalikan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Ansel, Chris, dan Alison Gash. (2008). Tata kelola kolaboratif dalam teori dan praktik. *Jurnal Publik*

Agus Dowiant. (2015). Mencapai pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik. Perpustakaan Mahasiswa Yogyakarta

Agranoff, R, dan Mc Guire, M. (2003). Manajemen publik kolaboratif. Universitas Georgetown.

Al-Mukhtar, Swarna. (2015). Dasar-dasar studi kasus kualitatif. Bandung. Judul Perpustakaan Independen

A, Yoeti, Oka. (1999). Pengantar Kajian Pariwisata Edisi Revisi. Bandung : Angkasa Penerbit.

Bambang, Sunaryo. (2013). "Konsep kebijakan dan aplikasi pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia". Yogyakarta: Gava Media.

Davis, Althea L., dan Rehema M. White. (2021). "Kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam": Menyelaraskan harapan pemangku kepentingan dalam pengelolaan satwa liar Skotlandia", *Jurnal Manajemen Lingkungan*, 112, 160-169.

Emerson, Kirk, Tina Nabach, dan Stephen Balogh. (2011). "Kerangka Terpadu untuk Manajemen Kolaboratif," *Jurnal Penelitian dan Teori Administrasi Publik*, 22(1), 1–29.

Emerson, K., Nabach, T., Balogh, S. (2011). Kerangka kerja terpadu untuk kolaborasi.

Faludi, A. (1973). "Tampilan Sistem" dan Teori Perencanaan. Ilmu perencanaan sosial dan ekonomi. [https://doi.org/10.1016/0038-0121\(73\)90012-8](https://doi.org/10.1016/0038-0121(73)90012-8)

Henry, Nicholas. (1988). *Administrasi nasional*. Luciana D. Terjemahan Ronto. Dari judul aslinya "Administrasi dan Rakyat". Jakarta. Pers Rajawali.

Bodoh, J. Lexi. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Versi revisi. Jakarta: PT. Masa remaja Rozda Kariya.

Nasikun. (1993). *sistem sosial indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Khusus Non Fisik

Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018